

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **842890**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.180.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/350 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.470.000.000
2. Tanah Seluas 703 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 246.500.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 224.000.000
5. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **124.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI STRADA 2.5L Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO NC12A1CFA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO NC110DAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **87.800.000****D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **10.044.790****F. HARTA LAINNYA** Rp. **160.000.000****Sub Total** Rp. **2.562.344.790**



III. HUTANG

Rp. 224.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.338.344.790

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.